

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Konsep kinerja pemerintahan daerah muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terstruktur. Artinya bahwa visi misi tidak akan bermakna ketika tidak terstruktur dengan baik dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance* (Anggraeni, 2009)

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukan suatu rencana yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi tersebut, yang bersifat satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012)

Permasalahan penganggaran yang terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pendapatan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam kumpulan RK SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran (Subiyanto, 2011).

Penentuan anggaran secara *incremental*, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi siapa yang mengajukan anggaran (fatikhah R, 2013). Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintahan Daerah.

Terlepas dari permasalahan anggaran, kinerja organisasi pada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep belum terbilang optimal hal ini dapat dilihat dari opini bahwa pada memasuki akhir tahun 2019 anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Sumenep masih mentok di angka 25 persen dari Rp2,7 triliun capaian tersebut masih jauh dari realisasi dengan baik ke beberapa badan organisasi yang ada di Kabupaten Sumenep.

Sebagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dalam tahun anggaran 2020, melaksanakan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja urusan kesehatan, tercapai 95%. Pencapaian kinerja pada tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 termasuk predikat Sangat Berhasil. Dari 3 indikator yang ditetapkan terdapat 2 indikator yang belum mencapai sesuai target RPJMD 2020. Realisasi akumulasi sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep menghasilkan nilai rata-rata sebesar 142.53%, ini juga termasuk predikat Sangat Berhasil. Dari 9 indikator yang ditetapkan terdapat 4 indikator yang belum mencapai target RPJMD 2016. (Sumber : Dinkes Kab. Sumenep, 2020).

Hal tersebut menunjukkan kinerja dari ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep perlu ada peningkatan, karena masih terdapat beberapa ASN dalam kinerja yang masih rendah, serta adanya beberapa ASN yang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Konsep kinerja pemerintahan daerah muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terstruktur. Artinya bahwa visi misi tidak akan bermakna ketika tidak terstruktur dengan baik dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance* (Anggraeni, 2009)

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukan suatu rencana yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi tersebut, yang bersifat satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012)

Permasalahan penganggaran yang terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pendapatan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam kumpulan RK SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran (Subiyanto, 2011).

loyalitas kerjanya rendah, terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan hanya dikerjakan sebagian ASN, sedangkan ASN lainnya tidak ikut berperan dalam kegiatan, walaupun ASN dalam satu Bagian.

Melihat dari permasalahan di atas berupa alokasi anggaran pendapatan belanja daerah Dinas Kesehatan, memerlukan penganggaran yang lebih baik selain itu agar tidak terjadi tumpukan maka tentang alokasi belanja daerah, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran secara terukur dan menjadi penting salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah pengembangan standard biaya (Fadilah,2009).

Penelitian ini perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran dan biaya dapat untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kinerja organisasi. Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini di antaranya, Penelitian Asmarani (2013) yang menguji pengaruh perencanaan anggaran, pengelolaan kas dan pelaporan, terhadap kinerja kepala SKPD menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaporan kas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja kepala SKPD. Penelitian Salbiah dan Risky (2012) yang menguji pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja SKPD pemerintahan provinsi Sumatra Utara. Perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini digunakan perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi dengan menambahkan variabel moderating.

Perencanaan anggaran yang diterapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep senantiasa mengevaluasi anggaran tahun sebelumnya yang kemudian ditambah 10% dari anggaran tahun lalu sehingga kegiatan yang direncanakan nantinya memenuhi sasaran yang tepat dalam kesehatan publik di Kabupaten Sumenep.

Atas dari uraian latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep?
- 1.2.2 Apakah Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep?
- 1.2.3 Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk Menganalisa Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1.3.2 Untuk Menganalisa Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1.3.3 Untuk Mengetahui Variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek teoritis dan prktisi sebagai berikut:

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian sebagai bahan referensi untuk dapat mengetahui perencanaan anggaran dan relaisasi anggaran berdasarkan akuntansi pemerintah.

##### **1.4.2 Secara Praktis,**

Penelitian ini untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, referensi atau tambahan informasi bagi Dinas Kesehatan dalam penataan evaluasi anggaran yang didasarkan pada kinerja pegawai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

##### **1.4.3 Bagi Peniliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dan kemampuan berfikir serta manjadi referensi

untuk penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi kinerja pegawai.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti agar permasalahan dari penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan pada perencanaan, evaluasi anggaran dan kinerja organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

